Polda Jateng Dirikan 35 Posko Netralitas

SEMARANG (KR) - Jajaran satuan wilayah (Satwil) di Polda Jateng mendirikan Posko Netralitas TNI-Polri di 35 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah. Posko resmi operasional mulai 26 Januari hingga 20 Februari 2024. Posko dijaga personel TNI-Polri selama 24 jam setiap hari. Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (30/1) kepada wartawan. Ia menegaskan, posko-posko netralitas yang didirikan di seluruh kabupaten dan kota adalah wujud kerja sama antara Polda Jateng dan Kodam IV/Diponegoro.

"Posko didirikan di lokasi-lokasi strategis seperti alun-alun, pusat keramaian dan pemusatan massa lainnya. Tujuannya agar masyarakat segera mengetahui dan mudah melaporkan apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran terkait Netralitas TNI-Polri selama pelaksanaan Pemilu 2024," jelas Kombes Stefanus Satako.

Posko Netralitas, lanjutnya, akan dijaga tiga regu TNI-Polri yang bertugas secara bergantian untuk bersiaga menerima aduan masyarakat selama 24 jam. Adapun personel-personel yang dilibatkan berasal dari unsur Propam Polri dan Polisi Militer TNI. Aduan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke posko, tetapi dapat juga dilakukan melalui aplikasi WhatsApp.

"Masing-masing posko dilengkapi sarana komunikasi seperti HT dan sarana telepon seluler yang dilengkapi aplikasi WhatsApp. Nomor WA di masing-masing wilayah tidak sama. Masyarakat dipersilahkan datang untuk menanyakan dan mencatat nomor kontak WhatsApp langsung di posko," tandas Stefanus Satako. Kabidhumas juga menjelaskan, pendirian posko Netralitas merupakan bentuk komitmen Polda Jawa Tengah dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas selama Pemilu 2024. Termasuk juga dalam menjaga kewajiban seluruh anggota TNI-Polri untuk bersikap Netral atau tidak terlibat dalam politik praktis. "Jangan sampai pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah menjadi terganggu karena ada isu-isu anggota TNI-Polri yang tidak netral dan sebagainya," tegasnya.

Ia menjamin, setiap laporan masyarakat yang disampaikan ke posko-posko Netralitas akan ditindaklanjuti dan para pelaku pelanggaran akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai aturan yang ada di institusi TNI maupun Polri," tandas Kombes Pol Satake Bayu. **(Cry)-f**

KR-Istimewa

Posko Netralitas Polri-TNI yang didirikan jajaran Polda Jateng.

72.568 KK di Purworejo Dapat Bantuan CBP

PURWOREJO (KR) - Sebanyak 72.568 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 16 Kecamatan se-Kabupaten Purworejo menerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP merupakan program nasional yang disalurkan melalui bulog. Penyaluran tahap pertama dilaksanakan Sabtu (27/1/2024), menyasar empat kecamatan (Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Bagelen dan Purwodadi) untuk 540 KK dari total 15.786 KK. Minggu (28/1/2024) di Kecamatan Bruno, Kemiri, Pituruh dan Butuh.

Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH mengatakan, CBP merupakan bagian dari program nasional. Penyaluran dilaksanakan Perum BULOG melalui PT Pos selaku transporter kepada penerima bantuan pangan. Masing-masing penerima sebanyak 10 kilogram, dan diberikan selama 6 bulan ke depan. "Selain CBP, kami juga bagikan bantuan CSR kerjasama Bank Jateng, seperti di Kecamatan Kemiri kami buatkan jamban untuk 17 orang penerima, stunting 27 orang dan penerima bantuan RTLH 2 orang," katanya.

Yuli menerangkan, tujuan pemberian bantuan ini yakni untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan, sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi. "Bantuan yang diberikan juga untuk melindungi produsen dan konsumen," imbuhnya. Dijelaskan, data penerima yang digunakan adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo. "Hari ini yang diserahkan hanya simbolis, nanti oleh Kantor Pos akan dikirim ke desa masing-masing. Jadi tidak harus antri, kasihan yang sudah sepuh," jelasnya.

Pada bagian lain, Bupati berharap masyarakat dapat menjaga suasana kondusif jelang Pemilu 14 Februari 2024. "Jaga agar tetap kondusif. Siapapun pilihannya, berbeda boleh, tetapi saya ingin tetap guyub rukun," harapnya. **(*-5)-f**

KR-Istimewa

Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH secara simbolis menyerahkan bantuan CBP dan CSR.

TANGGULANGI KEMISKINAN DI BAYAT

Aqua Klaten Bantu Sambungan Listrik

KLATEN (KR) - PT Tirta Investama (Aqua) Pabrik Klaten berkerjasama dengan ESDM Provinsi Jawa Tengah menyerahkan bantuan 10 unit pemasangan instalasi listrik baru berbasis Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE)) di Bayat Kabupaten Klaten.

Rama Zakaria, Manager CSR PT Tirta Investama Klaten, Selasa (31) mengemukakan, pemasangan instalasi listrik baru ini tersebar di tiga desa wilayah kecamatan Bayat. Yakni di Desa Krikilan sebanyak 4 unit pemasangan instalasi listrik baru, Desa Talang 3 unit, dan di Desa Tegalrejo sebanyak 3 unit. Semua penerima termasuk kategori PKE.

"Sudah berjalan tiga tahun, kita kolaborasi dengan ESDM Jateng dalam pemasangan instalasi listrik yang sebelumnya kami distribusi di daerah jatinom dan sekitarnya. Di tahun ini kami mendukung 10 instalasi listrik baru," jelas Rama Zakaria. Lebih lanjut Rama Zakaria menjelaskan, upacara penyerahan secara simbolis instalasi listrik baru untuk PKE dilaksanakan di rumah Miyatun, Dukuh Gajahreji, Desa Talang.

Dihadiri oleh Budiyono, perwakilan dari ESDM Jateng beserta jajaranya, tim CSR PT Tirta Investama Klaten, dan Ajianto bersama jajaran dari Pemerintah Desa Talang.

Miyatun mengaku senang dengan adanya bantuan sambungan listrik tersebut. Ia dan 9 warga lainya kini sudah bisa merasakan manfaatnya. Diantaranya sudah bisa menanak nasi menggunakan rice cooker.

Sebelumnya, ia tidak bisa menggunakan rice cooker, karena listrik masih nyambung dari rumah tetangga. Bahkan sekarang Miyatun sudah bisa menikmati siaran televisi di rumahnya sendiri.

"Sebelumnya nyambung dari rumah sebelah, jadi satu instalasi dipakai dua rumah sehingga harus berbagi energi. Jika kedua rumah menyalakan rice cooker bersamaan tidak kuat (jeglek).

Pemakaian lampu juga terbatas, tidak bisa memakai lampu yang wattnya tinggi dan banyak," kata Miyatun.

Ajianto, perwakilan dari Pemerintah Desa Talang menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Tirta Investama Klaten dan ESDM Jateng atas bantuan yang telah diberikan kepada warganya. Ia berharap tahun ini bisa diberikan dukungan lagi untuk warga lainnya yang membutuhkan.

Menanggapi harapan dari pemerintah desa Talang, Budiyono dari ESDM Jateng mengatakan, pemerintah desa bisa mengajukan ke ESDM. Pengajuan sangat simpel dan mudah, cukup dengan mengirim KTP dan KK. Bisa difoto dan dikirim lewat WA. **(Sit)-f**

KR-Sri Warsiti

Raza Zakaria menyerahkan bantuan secara simbolis.

Salatiga Kota Toleran ke-3 di Indonesia

SALATIGA (KR) - Kota Salatiga turun ke urutan 3 sebagai Kota Toleran di Indonesia dari Indeks Kota Toleran (IKT) oleh Setara Institute pada penilaian 2023.

Kota Salatiga pada tahun ini meraih skor 6,450 dalam Indeks Kota Toleran (IKT). Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang meraih skor 6,417. Meski demikian, secara peringkat Kota Salatiga mengalami penurunan dari peringkat 2 ke peringkat 3. Perolehan skor Kota Salatiga berbeda tipis di bawah Kota Bekasi, Jawa Barat dan Singkawang, Kalimantan Barat.

"Saya baru satu setengah bulan menjadi Penjabat Walikota Salatiga, dan tentunya ini merupakan kerjasama dari Penjabat yang terdahulu dalam membersamai masyarakat Salatiga untuk mengimplementasikan bagaimana mewujudkan keberagaman ini adalah sesuatu yang sederhana, bermula dari kemauan maupun kesadaran dari seluruh masyarakat. Semoga ke depan kami tetap bisa membersamai masyarakat Salatiga untuk tetap meningkatkan toleransi beragama maupun toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari," kata Pj Walikota Salatiga Yasip Khasani, Rabu (31/1). Lebih lanjut diungkapkan menjaga toleransi di Kota Salatiga sudah menjadi sebuah budaya.

Sebab, di Kota Salatiga terdapat 39 etnis yang secara bersama-sama hidup bertetangga, bahkan dalam satu atap kontrakan. Meskipun berbeda etnis, suku dan agama, mereka bisa menjaga kerukunan dan saling berkontribusi satu sama lainnya.

Penjabat Walikota Salatiga, Yasip Khasani, dalam pidato penerimaan tropi dan piagam Kota Salatiga sebagai kota tertoleran ke-3 dalam Peluncuran ke -7 Indeks Kota Toleran tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (30/1).

Yasip Khasani hadir didampingi Sekda Kota Salatiga beserta Kepala OPD terkait dan Ketua FKUB Kota Salatiga.

Kota Salatiga masih berada di tiga besar predikat kota tertoleran di Indonesia. Yasip menyampaikan kebanggaannya terhadap masyarakat yang telah membawa Salatiga dalam keadaan yang rukun.

Ia berharap, toleransi tetap dijaga dan terus ditingkatkan. Dimana, masyarakat saling memahami nilai toleransi sampai pada level paling kecil, sehingga benar-benar menjadi semangat nafas maupun kultur masyarakat. Tokoh agama di Salatiga , Zaeuri warga Domas Salatiga memgaku bangga meski turun ke urutan ke-3 Salatiga sebagai kota toleran. **(Sus)-f**

Kades Diharapkan Tidak Lakukan Penyimpangan

PEKALONGAN (KR) - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengingatkan kepada seluruh kepala desa (Kades) dan aparatnya, yang telah menerima bantuan keuangan (Bankeu) agar dari Pemprov Jawa Tengah agar menggunakannya sesuai peruntukannya. Gubernur minta Kades tidak melakukan penyimpangan yang berakibat pada pelanggaran hukum.

Nana Sudjana mengatakan hal ini usai menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp 25,4 miliar kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pekalongan, Selasa (30/1). Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Jateng 2024 secara simbolis diserahkan Gubernur kepada sejumlah perwakilan kepala desa di Aula Sekretariat Kabupaten Pekalongan.

"Bantuan keuangan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari. Untuk mencegah adanya kemungkinan segala bentuk penyimpangan pengelolaan bantuan keuangan yang mengalir ke pemerintah desa, maka pengawasan dari kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun semakin diperketat," tegas Nana.

Nana mengatakan, bantuan keuangan dari Pemprov Jateng ini betul-betul harus dibawah kendali dari masing-masing kepala desa. Untuk itu Nana minta bantuan keuangan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Nana juga menjelaskan, bantuan keuangan bisa digunakan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan yang tersebar di 104 titik.

Di antaranya pembangunan jalan desa, saluran irigasi, maupun perbaikan sarana umum lain. Terutama sarana prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. **(Bdi/Riy)-f**

DIGELAR DI KAWASAN KAKI BUKIT MENOREH

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

MAGELANG (KR) - Simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan KPU Kabupaten Magelang di kawasan kaki Bukit Menoreh Borobudur Magelang, tepatnya di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Tuksongo Borobudur Magelang, Rabu (31/1). Kegiatan ini memperoleh perhatian masyarakat, sekitar pukul 09.30 sekitar 50 persen sudah masyarakat mengikutinya. Beberapa waktu lalu KPU Kabupaten Magelang juga sudah melaksanakan simulasi di Balkondes Majaksingi Borobudur Magelang.

Komisioner KPU Kabupaten Magelang Wardoyo di Balkondes Tuksongo diantaranya mengatakan dari 292 pemilih dalam DPT di TPS 9 Tuksongo Borobudur, ada 3 pemilih masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau pindahan, sehingga total ada 295 pemilih. Diharapkan nantinya sesuai tahapan, selesai pemungutan suara pukul 13.00. Setelah itu baru proses penghitungan suara. Dikatakan, simulasi ini nantinya juga menjadikan akan waktu istirahat kapan yang tepat maupun lainnya, sehingga waktu untuk menunaikan ibadah salat juga dapat terpenuhi maupun lainnya. "Jadi banyak hal yang perlu diambil, untuk diambil kebijakan bagaimana caranya sehingga nanti clear," katanya.

Dari hasil pemantauan, setiap pemilih lamanya sekitar 2-2,5 menit saat berada di bilik suara saat berlangsung simulasi, Rabu. Hal ini diperkirakan akan berbeda pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2024 mendatang, mengingat pemilih nantinya akan mencari partai mana yang disukai, juga caleg yang akan dipilihnya maupun lainnya, sehingga diperkirakan akan lebih lama. Hal ini nantinya yang mungkin akan ditambah durasi ketika menghitung kalkulasi tentang berapa waktu pemungutan suaranya secara riil. **(Tha)-f**

DPRD Mitra Sejajar dalam Penyelenggaraan Pemda

MAGELANG (KR) - Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 57 dinyatakan penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari kepala daerah dan DPRD dibantu perangkat daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga DPRD merupakan mitra sejajar Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, unsur eksekutif maupun legislatif harus berjalan selaras dalam mengemban dan melaksanakan aspirasi dan amanat rakyat.

Demikian antara lain dikemukakan Walikota Magelang HM Nur Aziz dalam sambutan tertulisnya yang dibaca Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholifi di forum Rapat Paripurna Istimewa Ketujuh Tahun Sidang 2024 dengan acara Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Magelang, atas nama Awan Hernomo dari PDI Perjuangan menggantikan Stin Sahyutri Soekisno SSos MM yang meninggal dunia. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno ini dilaksanakan Selasa (30/1).

Lebih lanjut dikatakan Walikota Magelang, bahwa kemitraan antara Pemerintah Kota Magelang dan DPRD Kota Magelang terjalin dengan baik selama ini, dan telah membuahkan hasil, dengan berbagai capaian dan prestasi baik di tingkat regional maupun nasional. "Serta yang terpenting adalah tingkat kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui berbagai media terhadap kinerja pelayanan pemerintah sangat baik," katanya.

Prestasi tersebut salah satunya ditunjukkan dengan pengakuan dari Ombudsman RI yakni peringkat 1 nasional Kepatuhan Penyelenggaraan Publik tahun 2023.

"Mari kita tingkatkan segala prestasi yang telah diraih dan berupaya melakukan berbagai terobosan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ajaknya.

Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menjelaskan, penyelenggaraan rapat paripurna dewan tersebut adalah sehubungan dengan adanya SK Gubernur Jawa Tengah nomor 170/3 tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan PAW DPRD Kota Magelang masa jabatan tahun 2019-2024.

"Terhadap SK Gubernur Jawa Tengah tersebut, disepakati untuk dapat segera agendakan rapat paripurna dengan acara pengucapan sumpah pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Magelang dari PDI Perjuangan atas nama Awan Hernowo yang menggantikan Stin Sahyutri Soekisno, dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia," paparnya. **(Tha)-f**

KR-Thoha

Ketua DPRD Kota Magelang saat menyerahkan SK pelantikan kepada Awan Hernowo.